

Abstract Dan Executive Summary

LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SINGKONG BERBASIS
PENDEKATAN PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP
DI KABUPATEN PACITAN DAN TRENGGALEK**

Tahun Ke 2 Dari Rencana 4 Tahun

Oleh

**DR.Triana Dewi Hapsari,SP,MP /NIDN.0015047108 (Ketua)
Dr. Alfian Futukhul Hadi, MSi/NIDN.0019077403 (Anggota)
Muh Hadi Makmur,S.Sos, MAP/NIDN.00071074004 (Anggota)
Drs Anwar MSi/0006066308 (Anggota)**

UNIVERSITAS JEMBER

2014

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SINGKONG BERBASIS
PENDEKATAN PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP
DI KABUPATEN PACITAN DAN TRENGGALEK**

Peneliti : Triana Dewi Hapsari, Alfian FH, MH
Makmur, Anwar
Mahasiswa Yang Terlibat : Andi
Sumber dana : DIPA BOPTN
Email : tridewisari.uj@gmail.com,

ABSTRAK

Tujuan penelitian ke-2 ini untuk mendeskripsikan model kelembagaan agribisnis singkong, di kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Dari desain itu akan tergambaran permasalahan dan solusi untuk membangun kemitraan tersebut secara lebih utuh, baik dari sisi petani/kelompok tani, swasta/industri juga pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif, alat analisis yang digunakan analisis triangulasi.. Data diperoleh dengan wawancara, kuisioner, Fokus Group Discussion (FGD) dan penelusuran serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fluktuasi produksi, produktivitas dan sumberdaya lahan di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek terkait dengan aplikasi kebijakan pemerintah daerah setempat. Trend luas areal dan produksi singkong menurun di kedua kabupaten. Usahatani singkong di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek belum menerapkan baku teknis budidaya singkong, terutama dalam penggunaan input produksi. Harga relatif singkong dibandingkan tanaman lain rendah. Ada tiga bentuk kelembagaan dalam agribisnis Singkong di daerah penelitian. Pertama kelembagaan komunitas yang lebih mendasarkan pada hubungan sosial yang kuat, tergantung pada patron, usaha sering kali dilandaskan pada norma atau nilai transendental-tradisional. Kinerja kelembagaan kurang adanya kreativitas untuk mengembangkan secara produktif dan ekonomis. Produktivitas lembaga tergantung pada dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah. Kedua, Kelembagaan Pemerintah. Kelembagaan ini struktur-keorganisasian sudah jelas. Masih bergantung pada dukungan struktur diatas, yaitu pemerintah pusat melalui program-program dari pemerintah pusat. Struktur masih berperan untuk meningkatkan produktivitas, belum diarahkan pada paska produksi. Ketiga bentuk kelembagaan Pasar, orientasi kelembagaan ini belum menyentuh untuk mengembangkan agrobisnis singkong. Tergantung adanya jaminan dan dukungan dari pemerintah.

Kata kunci (key word) : *Kelembagaan , Agribisnis, Singkong*

ABSTRACT

The purpose of this study 2nd to describe the institutional model of agribusiness cassava, in Pacitan and Psychology. It will be illustrated by the problems and solutions to build partnerships more fully, both in terms of farmers / farmer groups, private sector / industry also local governments. The method used in this research is descriptive qualitative methods, analysis tools used triangulation analysis .. The data obtained by interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and search and document review. The results showed that the fluctuation of production, productivity and land resources in Pacitan and Trenggalek related to local government policy applications. Trend acreage and production of cassava decreased in both districts. Cassava farming in Pacitan and Trenggalek not apply technical raw cassava cultivation, especially in the use of production inputs. Prices are relatively low compared to other crops cassava. There are three forms of institutional in Cassava agribusiness in the study area. First institutional larger community based on strong social relationships, depending on the patrons, businesses are often based on the norm or value-traditional transcendental. Institutional Performance lack of creativity to develop productively and economically. Productivity depends on the support institutions of external parties such as the government. Second, Government Institution. This institutional-organizational structure is clear. but still rely on the support structure above, through the programs of the central government. The structure is still a role for increasing productivity, not directed at the post-production. Third, institutional markets, institutional orientation is not touched to develop cassava agribusiness. Depending adannya warranty and support from the government.

Keywords: *Institutional, Agribusiness, Cassava*

EXECUTIVE SUMMARY

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SINGKONG BERBASIS PENDEKATAN PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP DI KABUPATEN PACITAN DAN TRENGGALEK

Peneliti : Triana Dewi Hapsari¹, Alfian FH², MH
Makmur³, Anwar⁴
Mahasiswa Yang Terlibat : Andi⁵
Sumber dana : DIPA BOPTN
Email : tridewisari.uj@gmail.com,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketahanan pangan menjadi persoalan yang penting bagi bangsa Indonesia. Presiden Soesilo Bambang Yudoyono dalam sambutannya pada pembukaan pekan pameran teknologi tepat guna di Semarang Jawa Tengah, menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian utama bangsa ini, selain persoalan air dan bahan bakar (TVRI, 25/10/2008).

Berdasarkan catatan FAO, sekitar 1 miliar orang di dunia terancam kelaparan. Di beberapa negara maju, 2 hingga 4 persen penduduknya mampu memproduksi makanan untuk seluruh penduduk, bahkan mengekspornya. Namun, di banyak negara berkembang, 60 sampai 80 persen penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya. (suryana, 2012).

Di Indonesia penduduk yang rawan pangan masih sangat tinggi, pada tahun 2010 misalnya, jumlahnya mencapai 35,71 juta atau 15,34% (BIN, 2012). Sedangkan daerah dengan proporsi rumah tangga rawan pangan tertinggi (43,33 – 33,26%) berturut-turut adalah Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Jambi,

¹ Prodi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian universitas Jember

² Jurusan Matematika, FMIPA Universitas Jember

³ Prodi administrasi publik, ilmu administrasi FISIP Universitas Jember

⁴ Prodi administrasi publik, ilmu administrasi FISIP Universitas Jember

⁵ Prodi administrasi publik, ilmu administrasi FISIP Universitas Jember

dan DI. Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa program peningkatan ketahanan pangan rumah tangga masih menuntut perhatian para pengambil kebijakan di bidang pangan dan gizi (Handewi P.S. Rachman, dkk 2005).

Tetapi kebijakan untuk menciptakan ketahanan pangan, termasuk ditingkat daerah sebagian besar masih difokuskan pada produk pangan beras. Sedangkan produk pangan lain belum dikembangkan secara optimal. Padahal di tingkat lokal terdapat bahan pangan melimpah dan sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat lokal, salah satu adalah singkong atau ubi kayu.

Kebijakan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan seperti singkong ini sangat penting artinya di dalam upaya penyediaan bahan pangan karbohidrat non beras, penganekaragaman konsumsi pangan lokal, pengembangan industri pengolahan hasil dan agroindustri serta upaya mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khusus petani (Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2012).

Kondisi saat ini, meskipun produksi singkong secara nasional menunjukkan tren positif, tetapi belum mencukupi kebutuhan, sehingga setiap tahun masih mengimpor. Pada akhir september 2012, impor tepung singkong mencapai 587.000 ton. Angka tersebut naik tajam jika dibandingkan dengan total impor pada tahun 2011 yang mencapai 435.000 ton.

Tabel 1: Jumlah Produksi Dan Impor Singkong Tahun 2008-2012

| Tahun | Jumlah Produksi (ton) | Jumlah Impor (ton) |
|-------|-----------------------|--------------------|
| 2008 | 21.756.991 | 64.443 |
| 2009 | 22.039.145 | 168.715 |
| 2010 | 23.918.118 | 294.839 |
| 2011 | 24.044.025 | 435.423 |
| 2012 | 22.677.866* | 587.000 |

Keterangan: *) Angka Ramalan II, BPS 2012

Sumber: data diolah dari bps.go.id dan kompas.com

Kondisi ini menurut Subagio terjadi karena komoditi Singkong masih dianggap sebagai komoditas inferior, pemerintah juga belum memberikan dukungan stimulus terhadap pengembangan bahan pangan berbasis lokal (Radar

Jember, 20/06/2010). Sedangkan direktoral jenderal tanaman pangan departemen pertanian mengidentifikasi ada beberapa faktor yang menyebabkan komoditi Singkongmasih belum berkembang; yaitu 1) masih rendahnya insentif yang diperoleh petani dibandingkan dengan komoditas tanaman lain sehingga minat petani melakukan budidaya singkongrendah; 2) persaingan penggunaan sumberdaya lahan dengan komoditas lain; 3) pola tanam dan teknologi belum diterapkan secara optimal; 4) kelembagaan/kemitraan belum tumbuh dan berkembang dan 5) sistem pemasaran belum berjalan dengan baik (Dirjen Tanaman Pangan, KEPMENTAN, 2012).

Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong berkembangnya usaha pertanian seperti ubi kayu. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengurus dan mengembangkan usaha pertanian. Selain untuk menciptakan ketahanan pangan, pengembangan usaha pertanian ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebab jumlah 31,02 juta penduduk miskin 64 persennya berada di pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian (BPS, 2012).

Kabupaten Pacitan dan kabupaten Trenggalek sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Data tahun 2011 di kedua kabupaten ini, sektor pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB, masing-masing, Pacitan 39 persen dan Trenggalek 39,35 persen. Semetara itu di Pacitan sektor jasa menyumbang 18 persen, sektor perdagangan sebesar 12 persen, dan selebihnya dari sektor-sektor lainnya. Di Trenggalek sektor perdagangan, Hotel, dan Restoran menyumbang 27,89 persen sektor Jasa-jasa 15,43 persen sedangkan sektor lainnya kurang dari 10 persen. (BPS, 2011)

Data tahun 2011 produktivitas terbesar kabupaten Pacitan sub sektor tanaman bahan makanan pangan adalah singkongsebesar 189,08 Kw/Ha, diikuti komoditi ubi jalar dan jagung masing-masing sebesar 87,07 Kw/Ha dan 50,35 Kw/Ha. Kacang kedele mempunyai produktivitas terendah yaitu hanya sebesar 10,80 Kw/Ha. Untuk singkongproduksi mencapai 594 ribu ton yang tersebar di

Kecamatan Donorejo, Parung, dan Kebonagung (Bappeda Jatim, 2011). Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2011 produksi terbesar untuk sub sektor pertanian juga singkong sebesar 328.073 ton, disusul padi 192.154 ton, terakhir jagung 84.695 ton (BPS, 2011). Dalam road map pengembangan singkong yang disusun oleh kementerian pertanian 2010-2014, kabupaten Pacitan menjadi salah satu daerah di Jawa timur yang menjadi target untuk pengembangan komoditi tanaman singkong (Dirjen Tanaman Pangan, KEPMENTAN, 2012)

Dari hasil penelitian tahap awal ditemukan bahwa terjadi fluktuasi produksi, produktivitas dan sumberdaya lahan di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek terkait dengan aplikasi kebijakan pemerintah daerah setempat. Usahatani singkong di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek layak diusahakan (R/C ratio lebih dari 1). Nilai R/C ratio usahatani singkong per Ha pada tahun 2013 di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek berturut-turut 1,79 dan 2,15. Produk agroindustri berbahan baku singkong di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek mempunyai nilai tambah positif. Pemasaran singkong dari Kabupaten Pacitan ke luar Kabupaten Pacitan sebagian besar dalam bentuk gaplek dan singkong segar. Pemasaran singkong di Kabupaten Trenggalek sebagian besar disalurkan ke luar Kabupaten Trenggalek dalam bentuk produk olahan tepung ketela (tepung dari gaplek), tepung pati (tapioca), chip casava dan chip mocaf.

Namun dari sisi kemitraan antara para pelaku agribisnis di Kabupaten Pacitan kurang berhasil dan di Kabupaten Trenggalek kurang optimal pelaksanaannya. Untuk itu menjadi penting pada penelitian tahap II ini untuk desain model kemitraan yang mampu mendorong perkembangan agribisnis singkong. Dari desain itu akan tergambar permasalahan dan solusi untuk membangun kemitraan tersebut secara lebih utuh, baik dari sisi petani/kelompok tani, swasta/industri juga pemerintah daerah. Selanjutnya dalam konteks kebijakan pemerintah akan ditemukan alternatif kebijakan daerah yang dapat memfasilitasi berkembangnya agribisnis singkong.

Model kebijakan pengembangan agribisnis singkong ini tentu harus diarahkan untuk menciptakan kerjasama dan peran yang jelas antara pemerintah, swasta terutama yang memiliki aktivitas hilir industri pangan dan komunitas

petani. Sebab seperti yang disampaikan ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono (2010), tanpa ada kerja sama yang baik antara petani, pemerintah, dan swasta, sulit untuk mengembangkan pangan di lahan pertanian potensial yang belum dikembangkan. Untuk itu perlu dilihat bagaimana kelembagaan terkait agrobisnis Singkong.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada Tahap ke 2 ini adalah untuk;

- 1) Mengidentifikasi aktor utama dalam kegiatan agrobisnis singkong di Pacitan dan Trenggalek
- 2) Mendiskripsikan Model kelembagaan agribisnis singkong di Pacitan dan Trenggalek

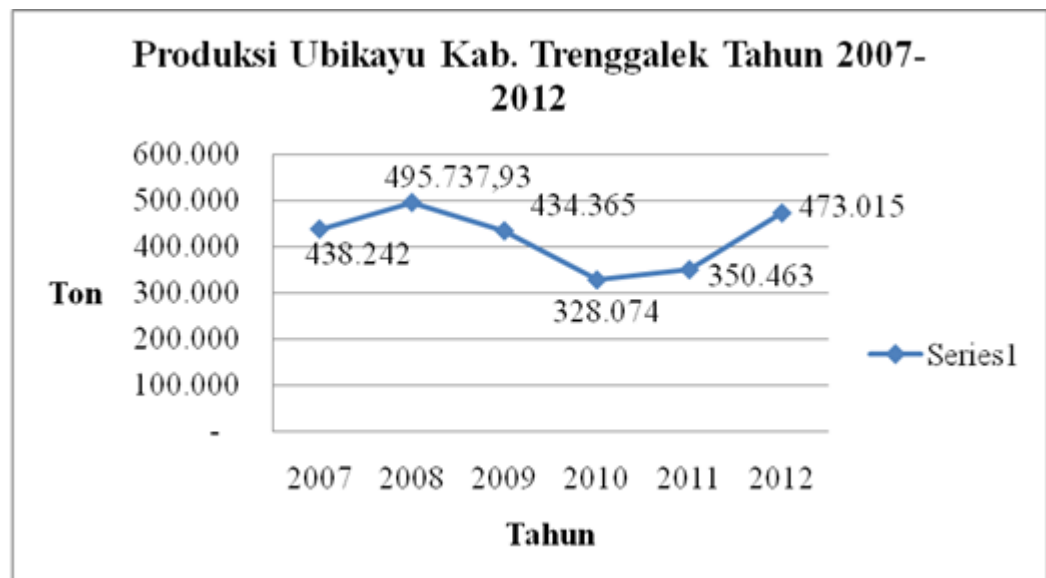
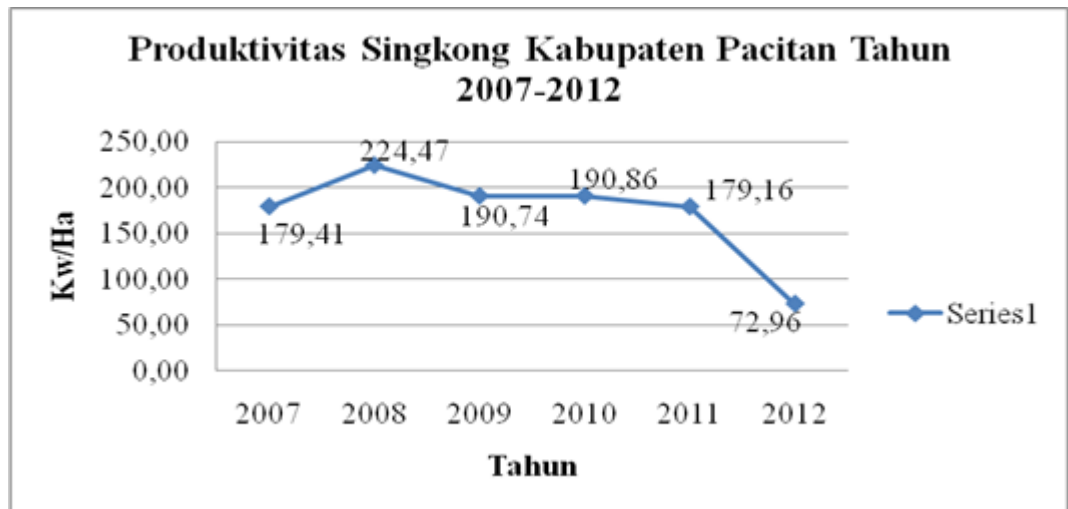
METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case Study*). Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Adapun Obyek penelitian adalah kelembagaan agribisnis singkong di daerah. Analisis yang digunakan adalah dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pertanian di Kab.Pacitan dan Trenggalek

Singkong merupakan tanaman pangan yang produksi dan produktivitasnya terbesar di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Data ini mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang menjadikan Pacitan dan Trenggalek sebagai salah satu sentra singkong di Propinsi Jawa Timur.



Pada analisis biaya usahatani singkong di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek semua input dinilai dalam bentuk uang dan diperhitungkan sebagai biaya.

Tabel 1. Biaya Usahatani Singkong per Hektar di Kabupaten Pacitan, Tahun 2013

| No | Komponen | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | % |
|-------|---------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Pajak | Ha | 1 | 24.000 | 2,20 |
| 2 | Bibit | Ikat | 10 | 150.000 | 13,75 |
| 3 | Urea | Kg | 94 | 187.500 | 17,19 |
| 4 | Ponska | Kg | 47 | 46.875 | 4,30 |
| 5 | Pupuk Kandang | Kg | 125 | 28.050 | 2,57 |
| 6 | Tenaga Kerja | HKP | 22 | 654.320 | 59,99 |
| Total | | | | 1.090.745 | 100,00 |

Sumber : Data primer (Diolah)

Tabel 2. Biaya Usahatani Singkong per Hektar di Kabupaten Trenggalek, Tahun 2013

| No | Komponen | Satuan | Jumlah | Nilai (Rp) | % |
|-------|---------------|--------|--------|------------|--------|
| 1 | Pajak | Ha | 1,0 | 24.300 | 1,80 |
| 2 | Bibit | Ikat | 10,0 | 150.000 | 11,09 |
| 3 | Urea | Kg | 177,2 | 289.300 | 21,40 |
| 4 | Ponska | Kg | 88,7 | 92.380 | 6,83 |
| 5 | Pupuk Kandang | Kg | 43,0 | 9.405 | 0,70 |
| 6 | Tenaga Kerja | HKP | 10,4 | 786.585 | 58,18 |
| Total | | | | 1.351.970 | 100,00 |

Sumber : Data primer (Diolah)

Kelembagaan Agribisnis singkong di Pacitan dan Trenggalek

Dari hasil penelitian ditemukan indikasi dalam dunia pertanian terkait singkong di kabupaten Pacitan dan Trenggalek bisa di kategorikan dalam di bentuk dasar kelembagaan, yaitu;

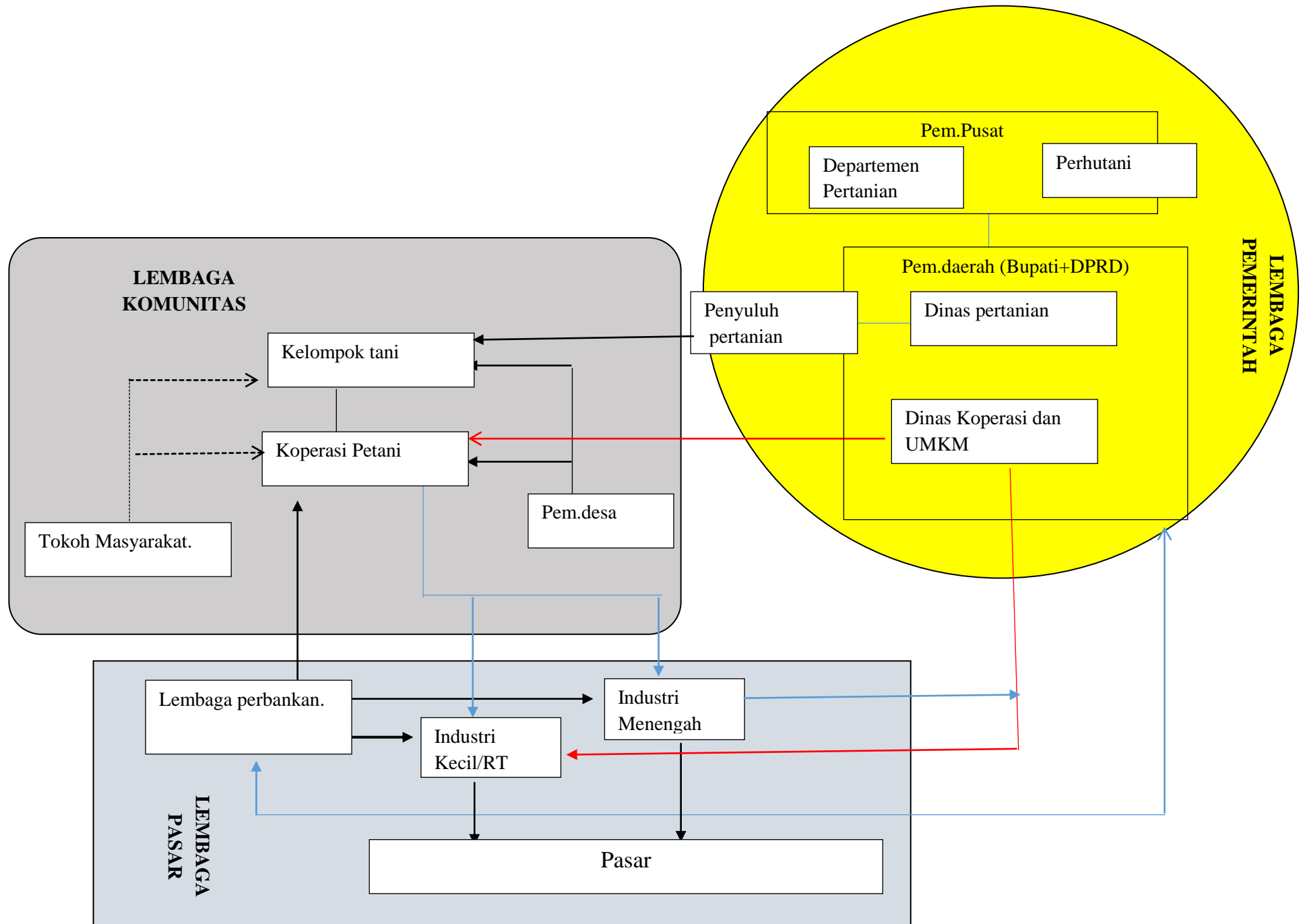
- Kelembagaan dalam bentuk kelembagaan komunitas, seperti kelompok tani dan koperasi
- Kelembagaan dalam bentuk kelembagaan pemerintah, yaitu penyuluh, dinas pertanian, pemerintah daerah dan pusat
- Kelembagaan dalam sifat pasar, seperti, penyedia input produksi, perkreditan-perbankan, industri, Badan Usaha

Ketiga kelembagaan memiliki hubungan yang sangat kompleks satu sama lain. Jika dilihat dari bentuk kelembagaan yang pertama, bahwa kelompok ini masih di dasarkan pada hubungan sosial yang kuat, tergantung pada patron, usaha sering kali dilandaskan pada norma atau nilai transendental-tradisional, seperti “nrimo Ing pandu”(pasrah menerima apa yang didapat), “sak dermo jogo urip” (sekedar untuk menjaga hidup-ada yang bisa dimakan sesaat). Sehingga kinerja kelembagaan lebih ditekankan pada fungsi untuk menjaga kekompakan secara sosial-horisontal kurang adanya kreativitas untuk mengembangkan secara produktif dan ekonomis. Kasus pada kelompok tani Bumi Mina Jaya di pacitan yang terbentuk pada tahun 2010, produktivitas kelompok ini tergantung pada dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah. Kondisi ini berangkat pada saat pemerintah melalui perusahaan daerahnya tidak mampu lagi bantu berproduksi. Dari

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kelompok tani juga belum mampu berinovasi sehingga produktivitas masih cukup rendah, belum muncul kemauan serius untuk merubah kebiasaan untuk menanam ketela dengan varietas yang baik. Pola pemasaran juga masih sangat sederhana.

Sedangkan bentuk kelembagaan yang kedua, secara struktur-keorganisasian sebetulnya sudah jelas. Dinas pertanian dan Dinas Koperasi-UMKM telah memiliki perangkat keorganisasian untuk meningkatkan agribisnis singkong. Kelembagaan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui program-program dari pemerintah pusat. Tetapi dari sisi sumberdaya nampak masih kurang tenaga penyuluh. Aspek kelembagaan dua dinas ini masih diarahkan pada struktur yang berperan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, belum diarahkan pada paska produksi. Hal ini terlihat dari belum secara serius pemerintah untuk menggerakkan organnya seperti BUMD untuk terjun pada bisnis berbasis singkong.

Gambar: Kelembagaan Usaha Agribisnis Singkong



Sumber : diolah dari hasil analisis

Sementara itu pada bentuk kelembagaan yang ke-tiga, belum muncul orientasi untuk mengembangkan agrobisnis singkong. Sehingga lembaga-lembaga keuangan atau kridet masih belum mampu menyentuh pemberian kredit pada petani untuk pengembangan singkong. Orientasi pemberian bantuan masih berdasarkan pada individu belum mengarah pada kelompok. Kecuali pihak perbankan telah mendapat jaminan dari pemerintah. Lembaga ke tiga ini masih sangat kuat untuk menjaga cara-cara konvensional. Sehingga belum muncul program-program yang dikeluarkan oleh kelompok ini bagi pengembangan agrobisnis singkong.

Dari hasil sementara analisis kelembagaan agrobisnis singkong di daerah penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat kinerja kelembagaan agrobisnis berbasis singkong. Pertama kondisi lingkungan eksternal. Kondisi ini menyangkut;

- Sosiokultural masyarakat dan kondisi industri-pasar yang belum menjadikan singkong sebagai komoditas yang unggul dan menguntungkan
- Pemerintah belum memiliki *goodwill* atau kemauan politik yang cukup kuat untuk mengembangkan sektor pertanian berbasis kondisi daerahnya. Pemerintah daerah masih sebatas bergerak menunggu dan menerima program dari pusat

Faktor yang kedua, motivasi kelembagaan yang masih lemah, yang ini tidak terlepas dari waktu munculnya perhatian, khususnya pemerintah untuk menggarap industri berbahan baku singkong, konsistensi pemerintah untuk menjadikan singkong sebagai bahan industri juga masih kurang. Faktor ketiga, kapasitas kelembagaan, hal ini terindikasi dari orientasi kepemimpinan yang belum sungguh-sungguh mengelola kelembagaan yang ada terkait agrobisnis singkong di dua daerah penelitian ini. Perencanaan program dan manajemen pelaksanaannya yang belum baik, terkesan “proyektif”.

KESIMPULAN

Fluktuasi produksi, produktivitas dan sumberdaya lahan di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek terkait dengan aplikasi kebijakan pemerintah daerah setempat. Trend luas areal dan produksi singkong menurun di kedua kabupaten.

Usahatani singkong di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek belum menerapkan baku teknis budidaya singkong, terutama dalam penggunaan input produksi. Harga relatif singkong dibandingkan tanaman lain rendah.

Ada tiga bentuk kelembagaan dalam agribisnis Singkong di daerah penelitian. Pertama kelembagaan komunitas yang lebih mendasarkan pada hubungan sosial yang kuat, tergantung pada patron, usaha sering kali dilandaskan pada norma atau nilai transendental-tradisional. Kinerja kelembagaan kurang adanya kreativitas untuk mengembangkan secara produktif dan ekonomis. Produktivitas lembaga tergantung pada dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah. Kedua, Kelembagaan Pemerintah. Kelembagaan ini struktur-keorganisasian sudah jelas. Masih bergantung pada dukungan struktur diatas, yaitu pemerintah pusat melalui program-program dari pemerintah pusat. Struktur masih berperan untuk meningkatkan produktivitas, belum diarahkan pada paska produksi. Ketiga bentuk kelembagaan Pasar, orientasi kelembagaan ini belum menyentuh untuk mengembangkan agrobisnis singkong. Tergantung adanya jaminan dan dukungan dari pemerintah.

REFERENSI

- , "Pacitan Akan Bangun Pelabuhan Niaga", diunduh dari <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/02/21/pacitan-akan-bangun-pelabuhan-niaga/> pada 2 maret 2013
- , 2010, Pertanian Tinjau Ulang Kebijakan Budidaya Pangan Oleh Swasta, diakses <http://cetak.kompas.com/read/2010/04/28/0429343/tinjau.ulang.kebijakan.budidaya.pangan.oleh.swasta.pada.2/3/2013>
- Basunu, E, 2003, Kebijakan Sistem Desiminasi Teknologi Pertanian: Belajar dari BPTB NTB, *Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1 (3), september 2003: 238-254*. Puslitbang Sosek Pertanian. Bogor
- Bennet, F. Lawrence, 1996, *The Management of Engineering: Human, Quality, organization, Legal, and Ethical Aspects of Professional Practice*, John Wiley & Sons, Inc., New York,.
- BIN, 2012 Hari Pangan Sedunia: Ancaman Krisis Dalam Kemandirian Pangan Indonesia, diakses dari <http://www.bin.go.id/wawasan/detil/141/3/25/09/2012/hari-pangan->

sedunia-ancaman-krisis-dalam-kemandirian-pangan-indonesia, pada 12/2/2013

- Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, 2012, Road Map Peningkatan Produksi Ubikayu Tahun 2010 – 2014, diakses dari http://tanamanpangan.deptan.go.id/doc_upload/47_Road%20Map%20Ubikayu%202010-2014.pdf pada 2/3/2013
- Haeruman, Herman. Js. “Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Lembaga Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat”. Sosialisasi Nasional Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Hotel Indonesia, 2001
- Lesser, E., 2000, Knowledge and Social Capital: Foundation and Application, Boston : Butterworth-Heinemann
- Makmur Hadi, 2008, Analisa Alternatif Kebijakan Daerah; Studi Kasus Terhadap Kebijakan Perikanan Laut Di Kabupaten Jember, dalam *Jurnal Aspirasi, Vol XVIII, No (khusus) Mei 2008*, FISIP Univ. Jember
- Rachman, Handewi, Mewa Ariani dan T.B. Purwantini. 2005. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Diakses pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ind/Mono26-2.pdf pada 21/2/2013
- Rohmad dan Sudarmo, 2009, , kebijakan kemitraan publik, privat dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata; studi tentang kebijakan kemitraan dalam pengembangan pariwisata di malang raya (artikel ilmiah) diunduh http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsirine.uns.ac.id%2Fpublikasi_NTgx_Kebijakan_Kemitraan_Publik_dan_Masyarakat_dalam_Pe_.pdf&ei=tiI8UfTiCYiurAeZqYG4Ag&usq=AFQjCNG91cD-5TS0i-ng83EiHqLOPaZUjQ&sig2=YZw-T8XvemmWy-mZGjwyCw&bvm=bv.43287494,d.bmk pada 20 februari 2013
- Sejati, W.K, Syahyuti T Pranadji, B.winarno dan H Tarigan, 2002, strategi keorganisasian petani untuk pengembangan kemandirian perekonomian pedesaan. Laporan hasil penelitian, Puslitbang Sosek Pertanian
- Siregar, H dan S. Masyitho. 2008. Dinamika Harga Pangan, BBM, Inflasi serta Kemiskinan, dan Implikasinya Bagi Ketahanan Pangan. Makalah disajikan pada Sidang Pleno XIII dan Seminar Nasional ISEI di Senggigi Lombok, 16-18 Juli 2008
- Slamet Suryana, 2012, Krisis Pangan: 8 Penyebab Pertanian Indonesia Tertinggal di akses dari

<http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/02/10/krisis-pangan-8-penyebab-pertanian-indonesia-tertinggal/> pada 15/2/2013

Subarsono AG, 2008, Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi, (cetakan.3), Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Suwarto dan Sapja Anantanyu, 2012, Model Partisipasi Petani Lahan Kering Dalam Konservasi Lahan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, Hlm.218-234*

Tatag Wiranto dan Antonius Tarigan, 2009, “Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)” Paradigma Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Permintaan Solusi Alternatif Atas Program-Program Pemberdayaan Bernuansa Karitatif “ diunduh dari <http://www.bappenas.go.id/node/48/2319/kemitraan-bagi-pengembangan-ekonomi-lokal-kpel-paradigma-perencanaan-pembangunan-ekonomi-berbasis-permintaan-solusi-alternatif-atas-program-program-pemberdayaan-bernuansa-karitatif---oleh-tatag-wiranto-dan-antonius-tarigan-/> pada 20 februari 2013